

DINAMIKA PERBEDAAN PENDAPAT DALAM FORMULASI KOMPI- LASI HUKUM ISLAM PADA ASPEK HUKUM WARIS, HIBAH DAN WASIAT

Muhammad Fadhlan Is

Dosen Prodi Hukum Keluarga STAIN Mandailing Natal

e-mail : fadhlan_102585@yahoo.com

Abstract

History records that the success in the effort to formulate a compilation of Islamic law was overshadowed by differences of opinion from several Islamic legal thoughts at that time. Moreover, there are many offers to include customary law and BW that are familiar to Muslims in the country into the KHI material. The emergence of differences of opinion among ulama is due to many factors, including their differences in using arguments, the method of *ijtihad* and understanding the *al-Qur'an* and *Sunnah* texts, the background, social, educational, and cultural backgrounds of the KHI formulators at that time. This study uses a descriptive qualitative research approach. This study answers the hypothesis that certain social values and solidarity play an important role in the conclusions of a legal product. In collecting data in this study, the authors used two techniques, namely direct interviews and documentation. Direct interviews with figures involved in formulating KHI and several Islamic legal experts who are seen as understanding the issues being studied. Also reviewing data from other sources such as documentation related to KHI formulations such as journals, newspapers, magazines, study manuscripts at the beginning of the KHI preparation and other sources of information. The results of the study show the fact that the formulation of KHI through a structural approach is top down from the central government, but still involves the role of the ulama, scholars and practitioners of Islamic law. KHI material absorbs *fiqh* that is familiar in the country. The dynamics of differences of opinion are found in three patterns of Islamic Law thought that emerged at that time. First, the *literalisasi* group, which is a group that opposes thoughts that violate the *nash qat'i*. Secondly, the group is *assimilative*, this group tries to find a new interpretation in understanding *nash qat'i*. The three groups are Harmonized, Characteristics of this group may be out of *zahir nash*, if judging there are provisions that can be an alternative, inheritance is included in the category of *mu'amalat* worship which must be open to accepting changes by considering the interests and eliminating the narrowness in society.

Keyword : *Dynamics, Differences of Opinion, Formulation, Compilation of Islamic Law, Inheritance, Grants and Wills*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian hukum kekeluargaan yang berkaitan dengan proses perpindahan harta warisan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Sampai saat ini fakta di masyarakat ketentuan waris ini sering melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, cendekiawan dan pemangku kebijakan yudikatif.

Begitu juga di masa-masa merumuskan ketentuan hukum waris KHI yang banyak menimbulkan polemik diantara tokoh dan ulama ketika itu. Misalnya saja perbedaan pendapat terkait ketentuan porsi waris anak laki-laki dan anak perempuan, Meteri Agama, Munawir Sjadzali, pernah melontarkan ide-nya untuk memberikan porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan, karena menurutnya ketentuan 2:1 yang terdapat dalam *nash* bisa dinasakh atau dibatalkan hukumnya karena didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat.¹ Ide beliau ini menimbulkan reaksi dari para tokoh dan kalangan umat, ada diantaranya yang menolak, ada yang menerima dan ada juga yang menerima dengan mencari jalan tengah.²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam kalimat tanya, bagaimana dinamika Perbedaan Pendapat ketika formulasi kompilasi hukum islam terkait hukum waris, hibah dan wasiat? serta bagaimana corak Pemikiran Hukum Islam di Indonesia ketika diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam terkait Hukum Waris, Hibah dan Wasiat?

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Perbedaan Pendapat Ketika Perumusan KHI.

a. Perbedaan Pendapat Terkait Penggagas Awal Lahirnya KHI.

Beberapa kalangan berbeda pendapat siapa sesungguhnya yang pertama sekali penggagas KHI di Indonesia. Menurut Abdurrahman³ ide ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Agama, Munawir Sadzali. Ide beliau ini itu disampaikan dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan Februari 1985. Semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan

¹Dahulu pada masa sebelum Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan meskipun hanya setengah. Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1993), cet ke-1, h. 43.

²Dapat dibaca dalam buku " *Polemik Aktualisasi Ajaran Islam*, penerbit Pustaka Panjimas yang terbit tahun 1988 di Jakarta.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 31

hangat dari berbagai pihak. Dalam pendapat yang lain,⁴ bahwa pencetus gagasan KHI adalah Busthanul Arifin.⁵ Busthanul Arifin menyatakan bahwa idenya ini timbul setelah Mahkamah Agung berjalan dua setengah tahun membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.⁶ Berbeda lagi dengan pendapat di dalam buku Prof. Dr KH. Ibrahim Hussein dengan tema pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Dalam buku tergambar, ide KHI berpangkal dari pemikiran KH. Ibrahim Husein yang disampaikan kepada Bustanul Arifin.⁷

Hasil penelitian penulis dari beberapa informan di antaranya Zafrullah Salim⁸ menjelaskan bahwa ide perumusan KHI awalnya dari Bustanul Arifin, beliaulah yang pertama sekali menggunakan istilah kompilasi, sebagai politik hukum Bustanul ketika itu. Tujuan beliau tidak menggunakan nama kodifikasi tapi kompilasi adalah sebagai jalan pintas, karena kalimat kodifikasi itu sangat sulit dan butuh waktu lama karena harus berbentuk peraturan perundang-undangan resmi dan harus ada persetujuan DPR yang waktu itu sangat fobia dengan syariat Islam.

Hal senada diperkuat oleh salah seorang perumus KHI\ Abdul Gani Abdullah.⁹ Menurutny, ide perumusan KHI awalnya digagas oleh Bustanul Arifin. Bustanul Arifin mengemukakan idenya tersebut dalam satu rapat kerja gabungan yang dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari Peradilan Umum, Ketua-

⁴Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI, 1991,1992),h.139

⁵Bustanul Arifin ketika masa formulasi KHI sebagai Hakim Agung Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dilahirkan di Payakumbuh tanggal 2 Juni 1929.

⁶Bustanul Arifin, *Kompilasi Hukum Islam:Fiqh dalam Bahasa UU*, (Pesantren, No.2/Vol.II/1985.Jakarta:P3M), h. 26

⁷Panitia Penyusunan *Biografi Prof. Dr KH. Ibrahim Hussein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990), h.223-224

⁸Zafrullah Salim, Sahabat Pak Bustanul Arifin, saat ini menjadi salah seorang Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. di Kantor MUI Pusat Jakarta. *Wawancara langsung*, jam 14.00- 16.00, 18 Februari 2019.

⁹Abdul Gani Abdullah, mantan Hakim Agung MA RI, dalam Kepanitian proyek KHI beliau ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus tim komisi tentang hukum wakaf dan membantu komisi perkawinan dan waris. di Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Wawancara langsung*, Kamis, 13 Februari 2019.

ketua Pengadilan Agama dan Militer se-Indonesia Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta.¹⁰

H. Poerwoto S. Gandasoebroto, S.H, sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dimasa itu, mengemukakan bahwa Busthanul yang sangat besar jasanya dalam membidani lahirnya RUU-PA dan KHI.¹¹ Kesimpulan penulis, dari berbagai literatur yang ada hasil wawancara dengan beberapa tokoh perumus KHI, dugaan terkuat inisiator awal penggagas KHI adalah Bapak Prof.Dr. Busthanul Arifin.

b. Perbedaan Pendapat Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Perumusan KHI serta Intensitas Keterlibatannya.

Kesimpulan penulis bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden dan beberapa struktural dibawah Presiden baik eksekutif maupun legislatif, punya andil besar dalam pembuatan KHI. Peran aktif pemerintah dalam pembentukan KHI tidak sebatas itu saja, dalam hal gagasan adanya rancangan penyusunan KHI juga bergulir dari kalangan birokrat, serta dalam hal tim proyek KHI juga diisi sebagian besar oleh orang-orang yang sama. Nmun tidak melepaskan keterlibatan ulama, intelektual dan cendikiawan Muslim, walaupun hanya sebagai informan ketika wawancara dan pada saat diundang dalam acara lokakarya KHI tahun 1988.¹²

M. Yahya Harahap, dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa:

“Tuduhan beberapa orang yang menyatakan dominannya keterlibatan penguasa waktu itu tanpa melibatkan ulama tidaklah benar dan diluar fakta yang sebenarnya. Tidak ada dominasi mazhab atau ormas mayoritas atau minoritas dalam proses perumusan KHI, semua komponen diajak berdialog seperti kegiatan Bahsul Masa'il dan Seminar yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, juga diadakannya beberapa seminar di beberapa Perguruan Tinggi. Dengan kegiatan tersebut banyak diperoleh masukan-masukan sangat berharga dalam perumusan KHI ketika itu”. Hal ini terlihat dari kegiatan akhir dalam

¹⁰*Ibid.*

¹¹Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin SH*((Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 13

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 95

menyempurnakan perumusan KHI dengan mengadakan lokakarya nasional di Jakarta tahun 1988 sebagai realisasi sebagai betuk komitmen tim perumus dengan melibatkan peran ulama.¹³

c. Dinamika politik dan Pluralisme Hukum waris Terhadap Rancangan Perumusan KHI.

1) Dinamika Reaksi penolakan KHI dari Kekuatan Politik Dan Non-Muslim.

Alamsjah Ratu Prawiranegara, mantan Menteri Agama menjelaskan seperti apa reaksi penolakan RUU-PA oleh kalangan Kristen dan Katolik serta Partai Demokrat Indonesia. Begitu hebat mereka menentang RUU-PA, sampai-sampai mereka menuntut pencabutan UU No. 14 Tahun 1970. Mereka tahu, undang-undang itulah sumber kelahiran RUU-PA. Alhamdulillah, karena Presiden/Mandataris MPR pun setuju, meskipun tantangan sangat hebat, kita tidak mundur. Dan RUU-PA pun akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴

2) Dinamika dari Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia.

Menurut Ratno Lukito, di antara faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat hukum kewarisan di Indonesia adalah:

a. Pluralitas Hukum Kewarisan Di Indonesia

Indonesia memiliki tiga sistem hukum kewarisan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yaitu kewarisan adat, kewarisan perdata dan hukum kewarisan Islam. sistem hukum adat, Islam dan BW. Ketiganya memiliki kedudukan yang sama dalam perkembangan hukum nasional.¹⁵ Mochtar Kusuma Atmaja menyatakan bahwa hukum waris di Indoneisa sangat sulit dilakukan unifikasi hukum karena memiliki kompilasi-kompilasi kultur, keagamaan dan sosiologi.¹⁶ Perumpamaan dapat dilihat ketika seseorang yang beragama Islam dan berasal dari Batak atau Minangkabau. Permasalahan inilah yang mengakibatkan

¹³M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*”,Mimbar Hukum, No.5 Tahun III 1992.

¹⁴Tulisan Alamsyah Ratu Prawira Negara, dalam buku Kenangan 65 tahun Prog.Busthanul Arifin.,*op.cit.*, h. 243

¹⁵ A Qodri Azizy, *Elektivitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 172

¹⁶ Eman Suparman, *op.cit.*, h.8

terjadinya dilema hukum karena setiap daerah memiliki konsep waris yang berbeda.¹⁷

b. Sakralitas Fikih Yang Telah Tertanam Dalam Jiwa Umat Islam Di Indonesia

Menurut kesimpulan penulis ada dua corak bermazhab dari kalangan Ulama dan masyarakat dalam memahami fikih, *pertama*, kelompok Ulama dan masyarakat yang sudah terbuka dan luas wawasannya, istilah reaktualisasi atau modernisasi tidak asing bagi mereka. Mereka pun tanggap memanfaatkan asas *mas}a>lih} mursa>lah* dan *qawa>'id fiqhiyyah* yang dinilai baik memberikan kemudahan dalam menerima ketentuan bahwa masalah perkawinan, perceraian dan poligami bukan lagi semata-mata *individual affair*. Akan tetapi menjadi urusan yang mesti dicampuri oleh 'umara.¹⁸ *Kedua*, kelompok ulama dan masyarakat yang merasa keberatan menerima pembaharuan hukum Islam yang ditawarkan oleh perumus KHI yang hadir. Alasan keberatan ini menurutnya disebabkan karena sudah sedemikian mengakarnya ketentuan hukum fikih mazhab syafi'i didalam jiwa mereka dan didoktrin mengikuti mazhab syafi'i tersebut. Penyebab yang lain adalah minimnya pengetahuan tentang pembaharuan hukum Islam khususnya di Pesantren-pesantren tradisional NU. Contoh kasus misalnya ketika pengesahan UU perkawinan pasal 1 tahun 1974, terkait harus dicatat secara resmi. Banyak kalangan Kiyai yang tidak dapat menerima bahwa pencatatan perkawinan itu wajib hukumnya, begitu juga aturan poligami mesti adanya izin dari Pengadilan Agama, semuanya itu dianggap mengada-ada karena mereka tidak menemukan dalil yang meyakinkan atau fatwa ulama mengenai masalah ini.

2. Dinamika Perbedaan Corak Pemikiran Hukum Islam Dan Beberapa Kasus Perbedaan Pendapat Dalam KHI.

Penulis membatasi lima contoh munculnya dinamika perbedaan pendapat terkait penggunaan metode ijtihad dalam hukum waris hibah dan wasiat ketika perumusan KHI yaitu: Permasalahan porsi waris anak laki-laki dan perempuan 2:1, permasalahan pengakuan eksistensi ahli waris pengganti, permasalahan

¹⁷Ratno Lukito, Guru Besar Hukum Islam sekaligus peneliti KHI dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di UIN Kalijaga Yogyakarta, *wawancara langsung*, Kamis, 31 Januari 2019, pukul 10.30.1200 WIB

wasjiat wa>jibah untuk orang tua dan anak angkat, permasalahan harta *mauru>s/* untuk janda/duda dan permasalahan terkait hibah.

a. Permasalahan Porsi Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan 2:1

Munculnya perbedaan pendapat yang paling tajam di kalangan ulama dalam merancang hukum kewarisan KHI adalah ketika wacana Menteri Agama Munawir Sjadzali dan Tim Perumus KHI¹⁹ yang ingin menyamaratakan porsi waris anak lelaki dengan anak perempuan menjadi 1:1. Munawir Sjadzali²⁰ dalam berbagai forum dan seminar terkait Hukum Islam,²¹ sering melontarkan gagasannya untuk memberikan porsi waris yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, gagasannya tersebut memancing polemik dan perbedaan pendapat diberbagai kalangan, ada yang mendukung dan tidak sedikit yang menentang keras gagasannya tersebut.²²

Untuk menguatkan pendapatnya itu Munawir Sjadzali memberikan beberapa argumentasi, diantaranya: *Pertama*, melihat “realita” kehidupan dimasyarakat Indonesia, banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan *pre-emptive* semasa hidupnya dengan membagi harta kekayaannya melalui lembaga “hibah” sebagai *hilah* agar tidak melaksanakan ketentuan waris dalam Islam. Fakta itu menyatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur’an itu tidak adil. *Kedua*, jika dinyatakan pembagian anak laki-laki dengan anak

¹⁹Dalam buku “*Polemik Aktualisasi Ajaran Islam*”, M.Yahya Harahap yang diutus melakukan wawancara ke beberapa daerah seperti Aceh, Medan, Makassar, Lombok, mengajukan beberapa pertanyaan yang mana kisi-kisi pertanyaan tersebut sarat mendukung gagasan dan pemikiran Munawir tersebut.

²⁰Munawir Sjadzali, MA, adalah Menteri Agama RI (Kabinet Pembangunan IV 1983-1988), lahir di Klaten tahun 1925 M.

²¹Pengakuan dari Munawir Sjadzali yang termuat dalam Panjimas, beliau menjelaskan penyampaian pikiran dan gagasan terkait Reaktualisasi Ajaran Islam sudah sering pada banyak forum ilmiah, misalnya, ceramah dengan tema tersebut beliau sampaikan pada Seminar Hukum Islam yang diselenggarakan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, Bahsul Masa’il Syuriah NU Jawa Timur ditambah beras, Jombang, Seminar Kompilasi Hukum Islam yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, penataran Pimpinan Ansor Tingkat Provinsi seluruh Indonesia di Malang. Dan dua kali Latihan tarjih Kader Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta, banyak lagi beberapa acara baik dalam dan luar negeri saya menyampaikan gagasan pemikiran Reaktualisasi Ajaran Islam.

²²Munawir Sjadzali, *Aktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1986), h. 12

perempuan 2:1 adalah bersumber dari dalil *Qat'i*, dalam kitab suci terdapat ayat-ayat yang berisikan pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang diturunkan sebelumnya. *Ketiga*, konsensus para ulama bahwa Hukum Islam terbagi atas dua kategori, yaitu Ibadah *mah}dah* dan ibadah *muamalah duniawiyah* (kemasyarakatan), hukum kewarisan yang termasuk dalam kategori hukum kedua ini. *Keempat*, ketika mesti mencontoh bagaimana ketauladanan dari Umar Bin Khattab, yang telah berani mengeluarkan kebijakan dalam bidang hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat-ayat al-Qur'an. Kasus yang paling terkenal adalah permasalahan pembagian rampasan perang yang keluar dari petunjuk al-Qur'an, surat al-Anfal ayat 41.²³

Penulis melihat adanya dinamika perbedaan pendapat yang tajam antara tiga corak pemikiran hukum Islam di kalangan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, baik yang bercorak tekstual, pemikiran bercorak kontekstual seperti pemikiran dari para penggagas fikih Indonesia.²⁴ Dinamika perbedaan pendapat dapat terlihat sebagai berikut:

1. Kelompok yang menolak Tawaran hak waris untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan Menjadi 1:1 Dan Argumentasinya.
 - a. Rifyal Ka'bah²⁵

²³ Panjimas, *op.cit.*, h. 9

²⁴ Gagasan ini awalnya di lontarkan oleh Menteri Agama Munawwir Sadzali. Beliau memandang pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan beralasan: 1) Sebagai bentuk kemashlahatan buktinya banyak terjadi ditengah masyarakat seorang ayah mengambil kebijakan *preventive (hillah)* dengan menghibahkan hartanya kepada anak perempuannya ketika dia masih hidup, 2) Hukum waris dalam Islam dipengaruhi budaya patriarkhi (garis keturunan ayah) bias dari kewarisan Arab jahiliyah sedangkan adat budaya Indonesia tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, 3) Pembagian waris dipandang masalah *mua'amalah duniawiyah* yang bisa berubah dalam kondidi tempat yang berbeda sehingga dibolehkan *naskh* (pembatalan hukum) sampai saat ini seperti yang telah dicontohkan Umar Bin Khattab yang berani mengeluarkan kebijakan dalam bidang hukum walaupun berbeda dari nash al-Qur'an.

²⁵ Dikutip dari Panji masyarakat, Rifyal Ka'bah menanggapi gagasan Munawwir ini dengan panjang lebar, namun disini penulis hanya membahas terkait tanggapan beliau dalam masalah konsep keadilan waris. Rifyal Ka'bah, lahir di Batusangkar tahun 1950, mendapatkan pendidikan rendah dan menengah di Su-

Rifyal menyatakan bahwa Munawir terpengaruh oleh konsep keadilan Liberal. Menurut Rifyal fungsi dan kewajiban mereka berbeda. Laki-laki sebagian suami dan ayah, posisinya dinaikkan sebagai kepala keluarga yang harus bertanggungjawab dalam nafkah lahir dan batin kepada keluarganya dan wanita sebagai ibu dan istri bertugas mengurus kedalam keluarga dengan mendidik anak dan memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini wanita tidak dibebani tanggung jawab keuangan.²⁶

Mengenai pembatalan hukum dengan *nasakh*, sekarang pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena wahyu telah terhenti dan rasul telah tiada, sementara itu, nalar manusia yang disebut *ra'yu* dapat digunakan sebagai sumber hukum, bila itu dibenarkan oleh *nash*, tetapi tidak pada posisi yang sama dengan hukum yang berdasarkan *nash*.

b. Ali Yafie²⁷

Menurutnya penggunaan nasakh dalam masalah waris anak ini tidak pada tempatnya lagi dan tidak menerima lagi perubahan.²⁸ Merubah hukum yang qat'i termasuk *'urf fa'sid* karena telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁹

c. Aminullah HM.

Aminullah menjelaskan bahwa logika yang digunakan oleh Munawir adalah “tidak matang” karena posisi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda.³⁰

2. Kelompok Pendukung Penuh Pemikiran Munawir Sadzali dalam Menyamakan Porsi Waris Anak 1:1.

matera Barat, pendidikan rendah dan menengah di Sumatera Barat, pendidikan tinggi di Cairo (s1 dan s2), dan s3 Ilmu Hukum UI. Pernah menjadi Dewan Pakar Hukum Depkeh dan HAM. Menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, Priode tahun 2000-2020.

²⁶ Panjimas, *op.cit.*, h. 67-68

²⁷ Ali Yafie adalah seorang ulama dan cendekiawan yang terlibat langsung dalam proses formulasi KHI, beliau pernah menjadi *Roi>sul A<mm* Pengurus Besar Syuriah Nahdatul Ulama (NU), tulisan ini adalah tanggapan dari pikiran Munawir Sadzali dalam majalah Panjimas tahun 1987

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 101

³⁰ *Ibid*

a. Masdar F. Mas'udi³¹

Terkait polemik pemikiran Munawir dalam permasalahan porsi waris anak laki-laki dan perempuan dalam pemikiran Masdar F. Mas'udi menyampaikan beberapa pikirannya diantaranya:³² ayat-ayat al-Qur'an tetap sebagai ayat yang berarti tanda dan simbol dari ide-ide universal, permasalahan *qat{i}* dan *z}anni* adalah produk ulama fikih, yang mana istilah ini diciptakan untuk membebaskan diri dari kontroversi yang cukup seru seputar "*mutasyabbihatu*", tuntutan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan keluarga adalah lebih berat dari pada yang harus dipikul oleh wanita. Tapi kondisi tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi sosiologi dan budaya suatu tempat.³³

b. M. Yahya Harahap³⁴

Menurut M. Yahya Harahap hukum warisan termasuk dalam kategori "*ibadah mu'a'malah*" substansinya pada hakikatnya bersifat "mengatur" bukan bersifat "*imperatif*" atau memaksa".³⁵ Dalam memahami kalimat "*fard}atan minalla>h*" menjelaskan bagian yang ditetapkan di situ merupakan garis batas minimum berarti ketetapan itu bukan sukatan ukuran mati. Tetapi dapat diperbesar jumlahnya apabila suatu masa dan tempat, masyarakat Islam menghendaki.

c. Nurcholish Madjid,³⁶

³¹Ketika formulasi KHI beliau adalah koordinator Penerbitan dan Dokumentasi pada Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta. Lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikan diperoleh di Pesantren API Tegalrejo, Magelang dan Pesantren al-Munawwar Krpyak, Yogyakarta. Memperoleh gelar keserjanaan bidang Syari'ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Atif menulis sejak di mahasiswa, dan sekarang aktif menulis Pelita, Warta NU dan Panji Masyarakat. Dan lain-lain.

³²Masdar F.Mas'udi, *Polemik pemikiran Aktualisasi Ajaran Islam Islam* : kumpulan tulisan dalam (Majalah Panji Masyarakat: Jakarta, 1988), h. 189-191.

³³. Masdar F.Mas'udi, *Polemik pemikiran Aktualisasi Ajaran Islam Islam* : kumpulan tulisan dalam (Majalah Panji Mas :Jakarta, 1988), h. 189-191

³⁴M. Yahya Harahap kelahiran Spirok tahun 1932, beliau adalah pakar hukum perdata yang juga mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung di era Orde Baru, beliau termasuk salah seorang Tim Perumus KHI, dalam proyek formulasi beliau ditunjuk sebagai pimpinan komisi hukum perkawinan.

³⁵*Ibid*, h 145

³⁶Nurcholish Madjid, salah seorang cendikiawan Muslim yang terkemuka di Indonesi, beliau adalah Ketua Yayasan wakaf Paramadina, Dosen Fakultas PPS IAIN Syarif Hidayatullah, ditahun 1978 mendapat tugas belajar di Universitas Chicago

Nurcholish menyampaikan dukungannya terhadap pemikiran Munawir ini dengan beranalogi dan mengkiaskannya dengan keberanian Ijtihad Umar bin Khattab, baginya perlu mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai ketentuan keagamaan³⁷ menurutnya bukanlah berarti peniadaan ayat atau *nas*, melainkan justru berpegang teguh kepada *nas* lain mengikuti kemashlahatan umum.³⁸

d. Jalaluddin Rakhmat³⁹

Menurutnya Jalaludin Ijtihad Umar tidak meninggalkan *nash*, apalagi mengganti atau menghapus ketentuannya. Ijtihad Umar memang meninggalkan *zahiriyah nas*, karena ia berpegang pada ruhanya *nas*, atau *maqasid al-Ahkam al-Syari'ah*.

3. Kelompok Pendukung Gagasan Munawwir Dengan Syarat Revisi.

a. K.H Ahmad Azhar Basyir⁴⁰

Menurutnya pengaturan hukum waris dalam al-Qur'an sudah diatur secara rinci, karena harta benda sangat mudah menimbulkan perselisihan karena secara naluri manusia sangat senang memperoleh kekayaan besar dan manusia seringkali serakah terhadap harta warisan. Untuk mengatasinya, Allah sendirilah yang membagi harta warisan secara teliti, menyeluruh dan utuh.⁴¹

Amerika, tamat tahun 1984 dengan keberhasilan mempertahankan Doktor dalam bidang kalam dan filsafat, beliau dikenal aktif memberikan seminar, dan menulis diberbagai media masa, jurnal dan sarana-sarana ilmiah lainnya. Dikutip oleh Nurcholis Madjid dari *majalah al-Muslimun*: al-Bahî al-Khulî, "Min Fiqh Umar fî al-Iqtisad wa al-Mal (Damaskus), No.4, Jumada al-Akhirah, 1373H/Februari, 1954, h.55-59

³⁷ kasus harta rampasan perang masalah tanah-tanah pertanian beserta garapan-garapannya yang baru dibebaskan tentara Muslim di negeri Syam, Irak, Persi dan Mesir

³⁸ Makalah ini disampaikan pada pengajian perdana Yayasan Wakaf Paramadina, 28 November 1986

³⁹ Jalaluddin Rakhmat adalah dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Pasca Sarjana Universitas Padjajaran dan ITB, Lahir di Bandung tahun 1949. Aktif menulis dan banyak makalah untuk seminar dan diskusi dan artikel yang diterbitkan dimedia masa.

⁴⁰ Azhar Basyir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. S2 di al-Azhar Mesir dengan judul tesis "Nizam Al-Mi'rat fi Indonesia bai'na 'Urf wa As-Syari'ah Al-Islamiyah" (Sistem Warisan di Indonesia menurut Hukum Adat dan Hukum Islam). Saat itu mengajar diperbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dalam bidang hukum dan filsafat Islam

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir dalam *Polemik Aktualisasi*, op.cit, h. 107-112

Ahmad Azhar Basyir memberikan solusi dan jalan tengah ketika seseorang hakim atau kondisi para ahli waris waktu itu menghadapi kasus khusus⁴², orang tua boleh melakukan “*sulh*” atau perdamaian yang dilakukan ahli waris setelah masing-masing mengetahui haknya sesuai ketentuan hukum waris karena semata-mata ingin menolong saudaranya yang susah.

b. K.H. Ali Darokah⁴³

K.H. Ali Darokah menjelaskan bahwa anak laki-laki tidak harus menerima dua kali lebih banyak dari anak perempuan.⁴⁴ Menurut hukum fara'id bukanlah semuanya dengan dasar dalil *qat'i* namun sebagiannya dengan dalil *zanni* yang diambil dari *ijtiha* dengan pertimbangan *qiya*s atau *maslahat* *mur-salah* atau lain-lain seperti masalah *hima* *riyah*, masalah *garawai* *n* dan masalah pembagian kakek dengan saudara laki-laki atau perempuan. KH Ali Darokah dalam memahami firman Allah “*Li-dzakari mishlu h}adzil unthsayai* *n*” apabila seorang laki-laki sudah menghilangkan syarat “kelaki-lakiannya” sudah barang tentu, ketentuan hukum baginya pasti dapat berubah.⁴⁵ Maksudnya disini adalah merelakan harta bagiannya yang telah ditentukan kepada waris lain dengan syarat, bahwa *Is* *la* *h* terjadi setelah masing-masing waris yang merelakan bagiannya, ia harus sudah mengetahui beberapa bagian yang menjadi miliknya, supaya jika ia rela, ya, benar-benar rela.⁴⁶

c. Syafruddin Prawiranegara⁴⁷

⁴²Ahmad Azhar Baasyir memberi contoh misalnya suatu keluarga mempunyai tiga orang anak, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, dua orang anak laki-laki sudah mapan dan memiliki kedudukan masa depan yang cerah, sedangkan anak perempuan telah bersuami tetapi kehidupannya susah dan melarat. Dalam menghadapi kasus ini, orang tua dapat mengadakan pertimbangan lain.

⁴³KH Ali Darokah, ketika masa formulasi terlibat sebagai responden dari kalangan Ulama di Surakarta, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Solo dan Penguasuh Pondok Pesantren Jamsaren, Solo. Lahir di Kampung Jamsaren tahun 1908 M.

⁴⁴Pernyataan ini disampaikan Munawir dalam suatu seminar mengenai hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lihat buku Munawir Sadzali, *Aktualisasi Ajaran Islam*, op.cit, h 10.

⁴⁵ Tulisan KH.Ali Darokah ini dimuat dalam majalah Panjimas tahun 1987, terkait polemik aktualisasi Ajaran Islam. h. 76

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Syafruddin Prawiranegara, ketika masa formulasi KHI adalah Ketua Umum Korps Mubaligh Indonesia (KMI), beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh teras Masyumi terkemuka, yang mempunyai minat dan perhatian besar dalam studi Islam,

Surat An-Nisa ayat 11 itu menurutnya masuk kepada *voluntary law* (hukum sukarela)⁴⁸ yang artinya hukumnya baru berlaku, jika yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif (pilihan) lain yang tersedia. Kalau semua ahli waris sepakat secara sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk membagi-bagi harta waris itu secara lain daripada yang ditetapkan dalam surat an-Nissa: 11, ini bukan merupakan “penyimpangan” dari ayat itu, tetapi sesuatu yang diizinkan Allah.⁴⁹

d. Amir Syarifuddin

Amir Syarifuddin menawarkan penyelesaian polemik ini, jika semua ahli waris sepakat secara sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun dengan melakukan *takharruj*⁵⁰ sebagai hukum rukhshah dalam fikih. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.⁵¹

2. Dinamika Perbedaan Pendapat Dalam Merumuskan Pasal Ahli Waris Pengganti.

Penulis menduga kuat pasal ahli waris pengganti⁵² adalah gagasan yang diambil dari pemikiran Hazairin, gagasan beliau ini disisipi oleh petinggi

ekonomi dan masalah kenegaraan. Pernah menjadi Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia. Lahir di Banten, 28 Februari 1911.

⁴⁸Hukum sukarela pada umumnya terdiri dari peraturan-peraturan yang mengenai perbuatan-perbuatan kita untuk memenuhi keperluan hidup kita di dunia ini. Biasanya kita mempunyai banyak pilihan jalan untuk mencapai satu tujuan. Hal ini dibolehkan selama jalan tersebut tidak melanggar kepentingan orang lain. Contohnya dalam permasalahan wanita muslimah memakai jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59, sedangkan ayat yang mutlak adalah surat an-Nissa ayat 31 yang memerintahkan wanita-wanita untuk menutup auratnya. Jadi artinya jilbab adalah salah satu pilihan dalam cara menutup aurat.

⁴⁹*Ibid.*, h. 35

⁵⁰Pada hakikatnya *takaruj* sama seperti *as-Sulhu* (perdamaian), termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian karena tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

⁵¹Misalnya saja harta peninggalan berbentuk tanah, rumah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan uang, yang lain membutuhkan rumah atau tanah.

⁵²Ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 185 KHI yang berbunyi: “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka-mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Mahkamah Agung disaat adanya jeda waktu pasca lokakarya ulama sampai keluarnya inpres (1988-1991). Dalam analisis Penulis, munculnya perbedaan pendapat dalam permasalahan pasal ahli waris pengganti muncul setelah lahirnya Inpres tahun 1991.

Munculnya dugaan bahwa masuknya pasal ahli waris pengganti ke dalam KHI yang dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, tampaknya perlu dianalisis dengan mengajukan pertanyaan penting terkait siapa yang pertama sekali mengeluarkan istilah ahli waris pengganti. Sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, ketika ada pemikiran Islam yang berbeda dengan pemahaman umum masyarakat yang sudah mapan selalu menuai kontroversi. Melahirkan tiga kelompok pemikiran hukum Islam, ada yang mendukung dan ada yang menolak, dan ada juga yang mendukung dengan revisi.

a. Kelompok yang Menolak Ketentuan Pasal Ahli Waris Pengganti.

Salah seorang ahli hukum Islam tanah air yang menolak ketentuan pasal ahli waris pengganti adalah Habiburrahman.⁵³ Beliau menjelaskan beberapa kekeliruan pasal ahli waris pengganti, di antaranya adalah pasal ahli waris pengganti meniadakan asas *ijbari dan* merubah ketentuan Allah, karena telah merampas bagian *mafrudhan* yang jelas terdapat dalam *nash*, sistem kewarisan Hazairin ini tidak sejalan dengan tujuan hukum kewarisan (*maqasid al-Syari'ah*),⁵⁴ pemikiran ahli waris pengganti yang diciptakan oleh Hazairin Adalah murni teori receptie, karena kandungan ayat yang harus mencocokkan dengan keadaan masyarakat adat Indonesia, pasal 185 KHI mirip dengan Pasal 841 B.W dan merupakan hasil rumusan tim yang tidak resmi, maka pasal tersebut harus ditolak.⁵⁵

b. Kelompok yang Mendukung Ketentuan Pasal Ahli Waris Pengganti dengan syarat perelunya direvisi.

1) Majelis Tarjih Muhammadiyah.

⁵³Mantan Hakim Agung RI, menjelaskan pendapatnya dalam disertasi dan dibeberapa seminar dan rapat para hakim di Lingkungan Pengadilan Agama.

⁵⁴ Habiburrahman, *op.cit*, h. 194

⁵⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Office, 1995), h.1-2.

Pada dasarnya Muhammadiyah mengakui pasal ahli waris pengganti. Muhammadiyah sependapat dengan KHI, Hal ini terlihat dalam salah satu jawaban atas pertanyaan masyarakat dalam majalah Suara Muhammadiyah No. 13 terbit tahun 1997.⁵⁶

2) Sayuti Thalib⁵⁷

Menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan *mawalli* oleh Hazairin sebagai berikut: “Cucu berdasar al-Qur’an surat an-Nissa ayat 33, digunakan garis hukum pertama berbunyi: “ dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan mawali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapaknya”.⁵⁸

3) Al-Yasa’ Abubakar.⁵⁹

Menurutnya pasal ini tetap berlandaskan kepada dalil yang ada dalam al-Qur’an. Selama ini masalah pokok yang menjadi perhatian para mufassir adalah *al-mawalli* dan ungkapan “*wa allayina ‘aqadat aima>nukum*”. Akan tetapi Lafaz “*al-walidan dan al-aqrabun*” cenderung tidak dibahas. Dengan kata lain, terjemahnya berbunyi: Allah menjadikan untuk setiap orang itu ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya dan anggota kerabat, sama seperti yang disimpulkan oleh Hazairin”.⁶⁰

4) Damrah Khair⁶¹

Mengemukakan pandangannya tentang ahli waris pengganti bahwa dalam memahami ayat-ayat kewarisan terdapat empat kelompok keutamaan ialah anak-

⁵⁶Seorang bertanya terkait Ahli waris pengganti, pembagian warisan satu petak sawah dari orang tua mereka, penanya bersaudara dua orang laki-laki, tapi abangnya itu telah meninggal, sekarang anak abangnya (keponakan) minta warisan tersebut, apakah keponakan saya berhak? bagaimana solusinya? Tim Majelis Tarjih menjawab dengan menggunakan pasal 185 KHI. Tim PP Majelis Tarjih Muhammadiyah, fatwa agama, suara Muhammadiyah No. 13 tahun ke 82 tahun 1997, h. 25-26

⁵⁷ Guru Besar Fakultas Hukum UI

⁵⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995), Cet ke V, h. 1.

⁵⁹ Al Yasa’ Abu Bakar, saat ini sebagai Guru Besar Hukum Islam di UIN ar-Raniri Banda Aceh, Hotel Daima Padang, wawancara langsung, 10 November 2018.

⁶⁰Al Yasa’ Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS 1998) h. 101

⁶¹ Guru Besar UIN Raden Intan Bandar Lampung.

anak (beserta keturunannya), orang tua, saudara-saudara (beserta keturunannya), dan *mawali* (ahli waris pengganti) untuk orang tua dari orang tua.⁶²

5) Amir Syarifuddin⁶³

Menurutnya penggunaan sistem penggantian ahli waris dianggap lebih adil dan lebih baik dari ijtihad yang dilakukan mujtahid terdahulu dalam versi fikih yang tidak membedakan penerimaan cucu dari anak laki-laki dengan anak perempuan.⁶⁴

3. Dinamika Perbedaan Pendapat terkait pasal *Was'iat Wa>jibah* dalam KHI.

Penulis menduga kuat ketentuan pasal *was'iat wa>jibah* adalah pasal yang disisipi oleh oknum petinggi Mahkamah Agung disaat adanya jeda waktu pasca lokakarya ulama sampai keluarnya inpres (1988-1991). Dalam analisis Penulis, munculnya perbedaan pendapat dalam permasalahan pasal *was'iat wa>jibah* muncul setelah lahirnya Inpres tahun 199.

Atho Mudzar dalam menanggapi Pasal 209 tentang ketentuan pasal *Was'iat wa>jibah* untuk anak angkat⁶⁵ dan orang tua angkat adalah suatu ketentuan yang sangat radikal. Dalam pasal 209 KHI jelas dinyatakan anak dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hibah atau wasiat bisa diberi *was'iat wa>jibah* sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan. Padahal al-Qur'an jelas-jelas memandang anak angkat tidak mempunyai akibat hukum. Langkah seperti ini memang belum pernah diambil oleh negeri Islam manapun dalam undang-undangnya.⁶⁶ Dalam setiap munculnya pemikiran baru menimbulkan respon dan

⁶²Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam dalam Pemahaman Hazairin*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988), h. 163.

⁶³Guru Besar Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang.

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),Cet keII, h. 274-275

⁶⁵ Anak angkat ada dua jenis, yaitu: *Pertama*, Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti itu hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan kewarisan antaraa mereka tidak ada.*Kedua*, Mengangkat anak yang dalam Islam disebut "*tabanni>*"atau dalam hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengngkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

⁶⁶Wawancara dengan Atho Mudzar di PPS UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Rabu, 13 Februari 2019

perbedaan pendapat, ada yang menerima, menolak dan menerimanya dengan revisi.

4. Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait *al-Maurūṣ* untuk Janda dan Duda (Ketentuan pasal harta bersama).

Ketentuan pasal harta bersama KHI⁶⁷ sudah dilegitimasi oleh perundang-undangan dengan nama harta bawaan termaktub dalam pasal 35-37 UU No. 1/74 jauh sebelum formulasi KHI.⁶⁸ Di antara fakta pernah terjadinya perbedaan pendapat ketika formulasi KHI terkait harta waris untuk janda di laksanakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 April tahun 1986.⁶⁹ Adapun permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat ini adalah:

- a. Perbedaan pendapat apakah harta bersama sama dengan *shirkah*.

Menurut Yahya Harahap, harta bersama ini termasuk kedalam golongan *syarikat abdan*. Karena dipersamakan dengan *syarikat abda>n* inilah pakar hukum Islam ketika merumuskan pasal harta bersama dalam KHI. Disamping tentu pakar hukum saat itu menggunakan pendekatan hukum adat yang telah lama mempraktekan harta bersama. Cara pendekatan yang demikian ini sesuai dengan teori "*urf*" sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al-a>datu muhakamah*".⁷⁰

⁶⁷ Dalam KHI pasal 97 menyebutkan:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kemudian ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa putusan pengadilan yaitu, yang kaidah hukumnya menyatakan:⁶⁷

"Seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya"

⁶⁸Dalam peraturan tersebut harta bersama adalah harta benda yang didapat setelah atau selama perkawinan.

⁶⁹Para ulama NU melaksanakan Bahsul Masa'il, yang diselenggarakan oleh Syuriah NU Jawa Timur. Bahsul Masa'il dilakukan 3 kali di dalam tiga Pondok Pesantren di Jawa Timur, Yaitu di PP. Tambakberas, PP. Lumajang dan PP. Sidoarjo. Para cendekiawan dan dunia kampus tidak ketinggalan melaksanakan seminar-seminar diberbagai daerah.

⁷⁰ *Ibid.*,

Kelompok yang menolak adanya harta bersama dalam hukum waris Islam adalah permasalahan apakah ketentuan harta bersama itu benar-benar hukum adat yang menyesuaikan dengan hukum Islam atau sebaliknya? Jika ketentuan pasal hak waris anak angkat diadopsi dari hukum adat murni berarti sebahagian kalangan menilai ini bentuk dari teori *receptie* Snouch Hurgronje dan Van Volenhoven.⁷¹

b. Perbedaan pendapat apakah pembagian harta bersama harus 50:50.

Kelompok ini menolak ketentuan harta bersama dibagi 50-50 sebelum dipenuhi syarat-syaratnya. Kelompok ini beralasan bahwa membagi sama rata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Masalahnya jika ada kasus istri hanya di rumah dan suami yang bekerja. Dalam kitab Bahsul Masa'il no 301, ditemukan pertanyaan warga NU cabang Kudus terkait harta bersama.⁷² Bahsul Masa'il NU mengakui adanya pembagian harta bersama yang diqiyaskan kepada "*syirkah*" namun NU tidak menerapkan pasal dibagi otomatis 50:50, sebelum mendapat persetujuan semua ahli waris yang masih hidup.⁷³

Adapun kelompok yang menerima di antaranya para penggagas fikih Indonesia seperti Hasbi ash-Shiddieqy dengan menafsirkan dari ayat al-Qur'an dan Hadis dan diharmonikan dengan BW dan hukum adat.⁷⁴

⁷¹ Desertasi Habiburahman, *op.cit.*, h. 199-200

⁷² Kitab bahsul masa'il NU berbentuk PDF, Pertanyaan nomor 301

⁷³ Alasan penolakan pemberlakuan otomatis harta bersama di kalangan NU adalah karena tidak adanya *shighat* ikrar ijab qabul yang keluar dari mulut (*talaf-fuz*) ketika akad suami dan istri, hal ini berdasarkan hukum fikih syafi'iyah yang di anut NU. Yang lain menilai pasal harta bersama ini cenderung mengabaikan ketentuan asas *ijbari* dalam kewarisan dalam Islam karena pada dasarnya pembagian warisan dinilai sudah tegas diatur di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

⁷⁴ Di antara istilah adat mengenai harta bersama ini, misalnya *gono gini* di Jawa, *hareuta sihareuikat* di Aceh, *harta suarang* di Minangkabau, *guna kaya* di Sunda, *gruwe gabro* di Bali, *barang perpentangan* di Kalimantan dan lain-lain yang kebiasaan adat istiadat yang sudah menyeluruh di Tanah air. Hasbi ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1973), cet. I, h. 46.

Majelis tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa jawaban dalam persoalan tanya jawab agama terkait warisan harta suami istri sependapat dengan KHI. Dalam Suara Muhammadiyah pernah dijelaskan bahwa walaupun harta bersama ini tidak secara eksplisit diatur oleh hukum Islam, akan tetapi jiwanya tidaklah bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *urf s'lah* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta pasangan suami istri. Bahkan menurut Muhammadiyah harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep *syirkah* (kongsi).⁷⁵ Penulis menyimpulkan bahwa Muhammadiyah dapat menerima ketentuan harta bersama dengan menjadikan KHI sebagai pedoman dalam penyelesaian hukum harta bersama suami istri.

5. Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Materi Hibah KHI.

Modifikasi yang berupa penegasan dan pengembangan ketentuan hibah dalam KHI dianggap ijtihad baru ulama Indonesia dan telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia ketika itu adalah:

- a. Tentang umur penghibah minimal 21 tahun.

Ketentuan usia kebolehan penghibah berusia minimal 21 tahun⁷⁶ berbeda dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya yang termuat dalam KUH Perdata yang menjelaskan usia dewasanya seseorang.⁷⁷ Juga berbeda dengan batasan baligh dalam fikih.⁷⁸ Namun pembatasan usia minimal tahun ini digunakan oleh KHI di samping perluasan dari pendapat mazhap Hanafi dan Syafi'i yang menyatakan wasiat atau hibah anak yang belum baligh tidak sah. Hasil rumusan KHI pasal 210 ini murni ijtihad penggagas fikih Indonesia dengan menaikkannya menjadi usia 21 tahun dengan alasan melihat umumnya anak-anak di Indonesia,

⁷⁵ Asuhan bagian fatwa dari Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah* dalam rubrik Fatwa Agama, No.14 TH. KE-85, 16-28 Februari 1994

⁷⁶ Dalam KHI Pasal 210 ayat 1 berbunyi "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

⁷⁷ Pasal 897 KUH Perdata, menentukan batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat atau hibah, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa, yaitu 21 tahun.

⁷⁸ Seseorang laki-laki baligh kalau telah mimpi basah sedangkan wanita kalau sudah menstruasi.

pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan..⁷⁹

b. Tentang pembatasan secara definitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3. Kelompok yang mendukung pembatasan hibah tidak boleh lebih 1/3 harta berargumen sebagai bentuk kemashlahatan, karena logikanya memberikan semua hartanya adalah suatu kesalahan dan mereka ini dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal dan dipandang tidak sejalan dengan syariat Islam. Namun terdapat pendapat yang berpendapat boleh hibah seluruh harta karena karena tidak ada nash yang tegas melarang.

c. Secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁸⁰

d. Orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.

Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Namun terdapat pendapat yang berpendapat tidak boleh hibah ditarik kembali. Larangan ini bersifat mutlak. Seperti hadis yang *mutafaqqun 'alaih* yang maknanya menyatakan orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikan, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.⁸¹

C. KESIMPULAN

Dari pemaparan dan uraian dalam beberapa bab-bab yang telah diungkapkan sebelumnya, sampailah penulis pada kesimpulan bahwa pada awalnya perumusan KHI bersifat *top-down* karena digagas oleh elit politik pemegang kekuasaan eksekutif maupun yudikatif melalui pendekatan struktural. Namun tidak bisa dinafikan keterlibatan dan peran para ulama, cendikiawan dan praktisi

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.361

⁸⁰ Abdul Manan, *op.cit.* h. 139

⁸¹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), juz 2, h.6

hukum Islam. Polemik muncul ketika formulasi KHI disebabkan adanya tawaran pemikiran baru dari segelintir tokoh penggagas fikih Indonesia yang berbeda dengan pemahaman umum masyarakat yang sudah mapan, sehingga melahirkan tiga kelompok pemikiran yaitu kelompok yang mendukung penuh, kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung pemikiran baru tersebut dengan syarat perlu adanya revisi. Perbedaan pendapat ketika formulasi KHI termasuk kategori *ikhtilaf tanawwu* (variatif) dan *al khilaf as sa'igh al maqbul* karena faktor terjadinya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memahami dan menggunakan dalil dalam penyelesaian suatu hukum syara'.

Dinamika perbedaan pendapat dalam formulasi pasal waris, hibah dan wasiat KHI terlihat dengan adanya proses dialektika syariah dengan sosio-kultural di Indonesia juga disebabkan polemik penerapan teori *maslahah*. Sehingga melahirkan tiga kelompok pemikiran hukum Islam, *pertama*, kelompok yang bercorak *tekstual*, kelompok ini menilai hukum waris termasuk kategori *ta'abbudi* dan *ijbari*, sehingga *maslahat*-nya hanya diketahui oleh Allah SWT dan *maslahat* yang bertentangan dengan nash bukan *maslahat* yang hakiki. Kewarisan adat dan BW yang tidak sesuai dengan *nash* tidak bisa diterima. *Kedua*, kelompok bercorak *kontekstual*, dalam merumuskan hukum kewarisan KHI corak kelompok ini menerima hukum adat dan BW, karena hukum Islam haruslah diderivasikan dari karakteristik masyarakat Indonesia. Kelompok ini mencoba menawarkan tafsir baru dalam memahami *nash qat'i*. *Ketiga*, kelompok pemikiran yang mengambil sikap harmonisasi (*wasatiyah*), yang tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu bebas. Waris termasuk kategori ibadah mu'amalat yang mesti terbuka dan *inklusif* menerima pembaharuan dengan tetap berpegang pada *nash* dan kemashlahatan umum seperti hukum Islam harus tunduk dengan hukum yang lebih besar (hukum nasional) dengan mempertimbangkan hirarki hukum yang berlaku di Indonesia. Dan jika dilihat dari segi metode ijtihadnya, beberapa pasal terkait waris, hibah dan wasiat dalam KHI umumnya melakukan penggabungan antara ijtihad selektif (*Ijtihad intiqa'i*) dengan ijtihad kreatif (*insya'i*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin SH*((Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Bustanul, *Kompilasi Hukum Islam: Fiqh dalam Bahasa UU*, Pesantren, No.2/Vol.II/1985.Jakarta:P3M.
- Al-Yasa' Abubakar, "Ahli Waris Sepertalian Darah, Jakarta: Inis, 1998.
- as-Shiddieqy, Hasbi *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 197.
- Azizy, A Qodri, *Elektivitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bruinessen , Martin van, *Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU* (Monash: Monash Asia Institute, 1996.
- Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditbinbapera Depag RI, 1991,1992.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*",Mimbar Hukum, No.5 Tahun III 1992.
- _____. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h tahun ke 82 tahun 1997
- Khair, Damrah *Hukum Kewarisan Islam dalam Pemahaman Hazairin*, Jakarta: Tesis Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, diterbitkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Kitab bahsul masa'il NU berbentuk PDF.
- Manan, Abdul *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Da>r Ihya >al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Munawir Sjadzali, *Aktualisasi Ajaran Islam*,(Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1986.

200. Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019,

Nurlaelawati , Euis, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, *Hukum Keluarga Islam ala Negara* Vol. 50, No. 1, Juni 2016.

Polemik Aktualisasi Ajaran Islam, penerbit Pustaka Panjimas yang terbit tahun 1988 di Jakarta.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, jilid II*, Kairo: Dar al-Fath, 1994.

Sunggono , Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sjadzali , Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1993.

Zahrah , Muhammad Abû, *Ushul al-Fiqhi*, Damaskus: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, tt.

Zuhailî, Wahbah *Ushul al-Fiqhi al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986.